

Strategi Ketahanan Pertanian Pangan Menghadapi Pandemi COVID 19 di Banten

Muhammad Ibrahim Rantau¹, Herijanto Bekt², Ida Widianingsih³, Caroline Paskarina⁴

^{1,2,3,4} Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran
 ida.widianingsih@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pandemi covid 19 tidak hanya memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, namun juga kemampuan wilayah untuk tetap menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Bagi pemerintah daerah Provinsi Banten, tuntutan untuk tetap mempertahankan produktivitas pertanian pangan dihadapkan pada beberapa persoalan krusial seperti permintaan yang rendah sebagai akibat dari pandemi dan resesi ekonomi, serta semakin berkurangnya lahan pertanian yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan Rencana Tata Ruang. Namun begitu, produktivitas hasil pertanian beras ternyata masih tetap terjaga, bahkan mengalami peningkatan. Provinsi Banten tercatat sebagai produsen beras peringkat 3 nasional, dengan surplus beras mencapai 160.132 ton pada panen raya Oktober 2020.

Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan produktivitas pertanian pangan, terutama beras, selama masa pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan konsep Agropolitan sebagai strategi pengembangan kawasan pedesaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif guna mengetahui secara mendalam bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan produktivitas pertanian pangan selama masa pandemi Covid 19.

Kata Kunci : Strategi Pembangunan, Pertanian Pangan, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTWR), Alih fungsi lahan.

ABSTRAK

The COVID-19 pandemic not only pressure on overall economic growth, but also the region's ability to provide food for the community. For the local government of Banten Province, the demand to maintain agricultural food productivity is faced with several crucial problems such as low demand as a result of the pandemic and economic recession, as well as the decreasing agricultural land, one of which is caused by the Spatial Planning Policy. However, the productivity of rice agricultural products is still maintained, even increasing. Banten Province is listed as a national 3rd rank rice producer, with a surplus of rice reaching 160,132 tons at the October 2020 harvest.

This study aims to find out how the Regional Government's strategy to maintain agricultural food productivity, especially rice, during the Covid 19 pandemic. This study uses the Agropolitan concept as a strategy for developing rural areas. The methodology used in this research is descriptive qualitative in order to find out the strategy of the Regional Government in maintaining the productivity of food agriculture during the Covid 19 pandemic.

Keywords: Development Strategy, Food Agriculture, Spatial and Regional Planning, Land conversion

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi covid-19. Pandemi ini tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi masyarakat. Hampir seluruh negara-negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 mencapai minus 2,3 persen dibanding sebelum pandemi. (Kemenkeu:2021) Sedangkan sektor yang paling terpuak adalah perdagangan yang mengalami kontraksi hingga minus 8,3 persen. Padahal pada masa sebelum pandemi, sektor perdagangan selalu tumbuh diatas 2 digit.

Di sektor pertanian, FAO sudah memperingatkan potensi krisis pangan global. Rantai pasokan pangan dunia juga terancam di tengah pemberlakuan karantina wilayah, pembatasan sosial, dan larangan perjalanan. Faktor lain yang ikut mengancam ketahanan pangan dunia adalah perubahan iklim yang sangat tidak menentu yang tentunya akan mempengaruhi produktifitas pertanian global.

Kebijakan setiap negara dalam mencegah penyebaran covid-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi mereka. Realitas itu menunjukkan, ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Jika dokter dan tenaga medis ialah tentara dalam upaya melawan penyebaran covid-19, begitu pun para petani, penyuluh, dan insan pertanian lainnya.

Pandemi covid-19 juga telah berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas-komoditas pangan. Disparitas harga antara produsen atau petani dan masyarakat konsumen menjadi lebar. Pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah berimplikasi terhambatnya distribusi dari sentra produksi ke wilayah perkotaan sebagai sentra konsumsi. Untuk itu, sektor usaha pertanian perlu beradaptasi dengan perubahan ini demi menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan selama masa pandemi

Pasandaran (2006) menyatakan bahwa meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan perkembangan industri dapat mengakibatkan permintaan beras terus meningkat untuk dikonsumsi secara langsung maupun untuk bahan baku industri. Penyediaan bahan pangan saat ini dan di masa yang akan datang akan menghadapi

tantangan utama dalam ketersediaan lahan yang semakin langka (*lack of resources*), baik luas maupun kualitasnya serta konflik penggunaannya (*conflict of interest*). Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak kepada pertambahan pemukiman untuk tempat tinggal, kebutuhan pembangunan, pengembangan industrialisasi, dan kebutuhan lainnya yang menyebabkan perubahan alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada penyusutan luasan lahan pertanian sebagai sarana produksi produk pertanian, maka alih fungsi lahan pertanian ke *non* pertanian menjadi tidak dapat dihindari, termasuk di Provinsi Banten.

Dalam konteks perlindungan lahan pertanian Provinsi Banten, Kajian Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjajaran pada tahun 2019 bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2018-2019 terjadi alih fungsi lahan di Provinsi Banten mencapai 3.861,09 hektar, dimana sebagian besar adalah lahan pertanian. (Dinas Pertanian Provinsi Banten: 2019). Temuan penyusutan lahan pertanian ini sekaligus melanjutkan trend penyusutan pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan dengan intensitas yang semakin tinggi. Pembukaan kawasan industri dan pemukiman baru di daerah-daerah sepanjang pantai utara serta jatuhnya komoditas pertanian selama masa pandemi ditengarai memberikan dampak terhadap kecenderungan alih fungsi lahan pertanian.

Table 1.1
Comparasion of Agricultural Land (ha)

No	Kabupaten /Kota	2019	2018	2014
1	Kab Serang	8.475	8.543	8.565
2	Kota Cilegon	1.626	1.715	1.735
3	Kota Tangerang	1.076	1.113	1.114
4	Kota Tangsel	-	54	213
5	Kab Tangerang	38.580	39.065	41.125

Sumber: BPS Provinsi Banten

Tekanan ekonomi selama masa pandemi yang membuat permintaan diberbagai sektor menurun, hingga trend alih fungsi lahan pertanian membuat produktifitas pertanian pangan di Provinsi Banten diprediksikan ikut mengalami penurunan. Faktor lain yang diprediksikan dapat menurunkan produksi padi adalah perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Sebagian besar produksi pertanian di Banten masih mengandalkan hujan sehingga masih sangat membutuhkan iklim dan cuaca yang normal. Perubahan iklim sekaligus menimbulkan gangguan lain seperti hama, bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Meskipun dihadapkan dengan persoalan dan tantangan yang secara matematis dapat menurunkan hasil pertanian pangan, namun produktifitas pertanian Provinsi Banten, terutama beras, justru mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Provinsi Banten bahkan termasuk dalam 9 besar produsen beras nasional, sekaligus mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian berdasarkan peringkat ke-3 sebagai provinsi dengan peningkatan produktivitas padi tertinggi periode 2019-2020. Data BPS pada tanggal 1 Maret 2021 menunjukkan bahwa Provinsi Banten menghasilkan padi sebanyak 1.655.170 ton gabah kering atau setara dengan 937.815 ton beras, dengan peningkatan sebesar 184.667 ton dari tahun sebelumnya. (BPS, Maret 2021).

Tabel 1.2
Produksi Padi Banten

Uraian	Tahun	
	2019	2020
Luas Tanam (ha)	314.241	336.711
Luas Panen (ha)	303.732	325.333
Produktivitas (ton/ha)	48,41	50,88
Produksi (ton)	1.470.503	1.655.170

Kecenderungan peningkatan produksi beras Provinsi Banten ditengah situasi pandemi Covid 19 serta maraknya alih fungsi lahan pertanian dan trend perubahan iklim, tentunya merupakan hasil dari sebuah strategi yang berkelanjutan baik dilakukan oleh petani, maupun Pemerintah. Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa bidang pertanian

pangan merupakan sektor yang menjadi andalan dalam pemenuhan pangan nasional yang terus dijaga dan diupayakan pengembangannya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia dalam mencapai kesejahteraannya. Pemerintah tentunya dituntut untuk terus mengupayakan swasembada pangan guna meningkatkan pendapatan nasional dan berpengaruh bagi peningkatan taraf hidup masyarakat petani, sehingga profesi petani tetap menjadi andalan bagi masyarakat pemilik lahan untuk terus menggarap lahan pertanian guna memproduksi tanaman pangan dan lapangan pekerjaan di sektor pertanian terus tersedia.

Presiden sudah memberikan arahan bahwa pandemi covid-19 menjadi momentum reformasi sektor pangan. Indonesia dituntut memenuhi seluruh kebutuhan pangan dalam negeri. Maka, langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Untuk bisa mewujudkannya, pemerintah sudah melakukan realokasi anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan berupa bantuan benih/bibit, program padat karya, stabilisasi stok dan harga pangan, serta distribusi dan transportasi pangan. Realokasi anggaran itu menjadi modal pemerintah mendongkrak produktivitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Kajian Literatur Teori Agropolitan

Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh McDouglas dan Friedman (1974, dalam Mahi, 2016) sebagai strategi pengembangan pedesaan. Agropolitan pada dasarnya adalah sebuah konsep yang ingin memberikan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan, atau dengan meminjam istilah Friedman adalah "kota di ladang". Dengan demikian, petani dan masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan fasilitas dan kebutuhan baik terkait dengan produksi pertanian maupun kebutuhan sosial dan sehari-hari lainnya.

Pusat-pusat pelayanan diberikan sedekat mungkin dengan pemukiman masyarakat desa, seperti pelayanan terkait produksi pertanian, kredit modal, teknik budidaya pertanian, hingga informasi pasar. Sehingga besaran biaya produksi

pertanian dapat diperkecil. Termasuk juga pelayanan terhadap kegiatan pertanian seperti sarana penunjang produksi (pupuk, bibit, peralatan, dan lain-lain), serta sarana penunjang pemasaran, seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, terminal, pasar, dan lain sebagainya. Konsep agropolitan sekaligus mengurangi potensi keluarnya arus modal dan tenaga kerja dari pedesaan. Bahkan sebaliknya mendorong penanaman modal dan tenaga kerja di pedesaan dalam rangka memperkuat ekonomi desa.

Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian disekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh administrasi pemerintahan, melainkan lebih ditentukan oleh skala kegiatan ekonomi yang ada. Dengan demikian, kawasan agropolitan adalah kawasan agrobisnis dengan seperangkat fasilitas perkotaan yang dimilikinya. Pengembangan kawasan agropolitan dirancang dengan mensinergikan berbagai potensi yang dimiliki demi mewujudkan usaha agrobisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya lahan yang sesuai untuk mengembangkan komoditas pertanian yang dapat dipasarkan maupun komoditas unggulan. Serta berpotensi untuk lebih mengembangkan diversifikasi usaha dari produk unggulannya.
2. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan sistem dan usaha agrobisnis seperti jalan, fasilitas pertanian, maupun fasilitas penunjang lainnya.
3. Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, dan air bersih.
4. Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi, perpustakaan, hingga swalayan.
5. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup, baik kelestarian alam, kelestarian sosial budaya, maupun relasi antara kota dan desa yang dinamis.

Dengan demikian, pengembangan kawasan agropolitan tetap membutuhkan pembangunan

infrastruktur penunjang pertanian oleh negara dalam rangka memberikan akses bagi terciptanya sebuah kawasan pertanian di desa yang terintegrasi dengan fasilitas perkotaan.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif guna mengetahui secara mendalam bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan produktivitas pertanian pangan selama masa pandemi Covid-19. Beberapa strategi yang hendak diteliti adalah strategi jangka menengah dan jangka panjang serta merupakan bagian dari konsep Agropolitan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk tetap menjaga produktifitas pertanian, yang antara lain adalah: 1). Perluasan Areal Tanam; 2). Peningkatan Indeks Pertanaman (IP); 3). Peningkatan Produktivitas, serta; 4) Pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perluasan Areal Tanam

Strategi perluasan areal tanam dilakukan melalui kegiatan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB). PATB merupakan kegiatan penanaman padi di lahan yang tidak dimanfaatkan, lahan yang biasanya tidak ditanami padi dan lahan yang belum masuk dalam perhitungan Luas Panen Kerangka Sample Area-Badan Pusat Statistik (KSA- BPS). PATB difokuskan di lahan kering, rawa, lahan di bawah tegakan, pohon perkebunan, lahan *replanting* sawit dengan menerapkan prinsip konservasi lahan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perluasan areal tanam di beberapa wilayah juga dilakukan dengan memanfaatkan lahan negara yang dikelola oleh Perhutani agar dapat berfungsi secara produktif sebagai lahan pertanian baru. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan stimulus kepada para petani di sekitar kawasan areal tanam baru. Berikut disajikan data kegiatan Perluasan Areal Tanam Baru di Provinsi Banten sebagai salah satu strategi pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan produksi padi di masa pandemi Covid-19.

Kegiatan PATB	
Kabupaten/Kota	Tahun 2020
Kab. Lebak	1.623
Kab. Pandeglang	4.500
Kab. Serang	7.340
Kota Serang	245
Jumlah (ha)	13.708

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten, 2020.

Realisasi kegiatan PATB di Banten tahun 2020 seluas 13.708 Ha, yang tersebar di Kabupaten Lebak seluas 1.623 Ha, Kabupaten Pandeglang 4.500 Ha, Kabupaten Serang 7.340 Ha, dan Kota Serang 245 Ha. Kebijakan perluasan areal tanam yang sebagian besar berada di wilayah selatan Provinsi Banten ini sekaligus untuk mengimbangi semakin berkurangnya lahan pertanian akibat kecenderungan alih fungsi lahan pertanian di wilayah utara seperti di Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, serta sebagian wilayah utara Kabupaten Serang.

Peningkatan Indeks Pertanian

Peningkatan Indeks Pertanian (IP) adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami. Berbagai upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas telah dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan *Demonstration Farming* (Demfarm) dan *Demonstration Plotting* (Demplot) kegiatan Intensifikasi komoditi padi, upaya ini telah terbukti mengungkit pencapaian produksi. Melalui upaya ini maka petani akan mampu mengelola potensi sumberdaya yang tersedia secara terpadu dalam budidaya padi di lahan usahatani secara spesifik lokasi dan musim, sehingga petani menjadi lebih terampil dalam penerapan teknis budidaya dan penggunaan teknologi alat mesin pertanian, serta mampu mengembangkan usahatannya dalam rangka peningkatan produksi padi.

Budidaya intensifikasi padi sawah berperan penting dalam meningkatkan produksi padi dalam beberapa tahun terakhir. Program pengembangan tanaman padi sawah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan beras dari varietas unggul yang dapat memenuhi kebutuhan. Permasalahan yang

dihadapi adalah jumlah produksi yang belum sebanding dengan luas pertanaman padi. Keterbatasan inilah yang menjadi dasar untuk melakukan upaya pemberdayaan petugas dan semua komponen di wilayah Provinsi Banten yang mendukung keberhasilan peningkatan produksi khususnya di Provinsi Banten melalui Demfarm Intensifikasi Padi Sawah.

Kegiatan *Demonstration Farming* (Demfarm) intensifikasi padi seluas 500 ha yang dialokasikan di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Serang seluas 150 ha, Kabupaten Lebak seluas 100 ha, kabupaten Pandeglang seluas 200 ha, dan Kabupaten Tangerang 50 ha. Pemberdayaan Petani melalui Demfarm padi merupakan upaya fasilitasi pembelajaran bagi kelompok tani melalui penerapan teknologi padi yang sudah teruji agar mampu menggunakan potensi yang dimilikinya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi.

KABUPATEN / KOTA	2019	2020	Surplus/ Minus
01 PANDEGLANG	419,230	444,026	24,796
02 LEBAK	348,869	402,871	54,002
03 TANGERANG	276,627	328,820	52,193
04 SERANG	345,163	391,973	46,810
05 TANGERANG	3,497	4,747	1,250
06 CILEGON	9,752	9,714	(38)
07 SERANG	67,345	73,014	5,669
08 TANGERANG SELATAN	21	5	(16)
JUMLAH (Ton)	1,470,503	1,643,469	184.667

Data Produksi Padi Tahun 2019-2020

Dari table di atas, tahun 2020 terjadi peningkatan produksi cukup signifikan sebesar 184.667 ton dibanding tahun 2019. Dimana peningkatan cukup signifikan terjadi di daerah yang melaksanakan Demfarm intensifikasi padi, yaitu Kabupaten Pandeglang meningkat produksinya sebesar 24.796 ton, Kabupaten Lebak meningkat sebesar 54.002 Ton, Kabupaten Serang sebesar 46.810 Ton, dan Kabupaten Tangerang terjadi peningkatan produksi padi sebesar 5.193 Ton.

Peningkatan Produktivitas

Sedangkan strategi peningkatan produktivitas dilakukan melalui perbaikan teknologi budidaya dengan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mengurangi kehilangan hasil (*losses*) dan input produksi berupa benih VUB-Varietas Unggul Baru seperti Inpari Nutrizinc, penggunaan pupuk berimbang (urea, NPK,

organik) yang sesuai rekomendasi, penggunaan pestisida yang ramah lingkungan dan menggunakan sistem tanam jarak legowo. Komponen bantuan terdiri bantuan benih padi 40 Kg/Ha, pupuk NPK Non Subsidi 250 Kg/Ha, dan Herbisida 3 Liter/Ha. Terdapat pula kelompok tani yang diberikan bantuan pembuatan Sumur Suntik/Bor, bantuan pembelian BBM (15 Liter/Ha) dan bantuan Padat Karya Olah Tanah dan Tanam (5 HOK/Ha).

Strategi ini didukung melalui kegiatan Bantuan Benih Padi tahun 2020 seluas 148.315 Ha yang tersebar di Kabupaten Pandeglang 48.860 Ha, Kabupaten Lebak 32.925 Ha, Kabupaten Serang 37.500 Ha, Kabupaten Tangerang 25.000 Ha, Kota Serang 3.750 Ha, dan Kota Cilegon 300 Ha. Jenis Bantuan yang diberikan berupa bantuan benih padi inbida sebanyak 25 Kg/ Ha.

Bantuan Benih Padi

Kabupaten/Kota	Tahun 2020
Kab. Lebak	32.925
Kab. Pandeglang	48.860
Kab. Serang	37.500
Kab. Tangerang	25.000
Kota Serang	3.750
Kota Cilegon	300
Jumlah (ha)	148.315

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten, 2020.

Ada pula kegiatan penyaluran sarana produksi untuk kawasan padi tadah hujan dan lahan kering seluas 525 Ha di Kabupaten Pandeglang di tahun 2020 dengan paket bantuan berupa benih padi 40 Kg/Ha, NPK Non Subsidi 100 Kg/Ha dan Herbisida 2 Liter/Ha. Di tahun 2020 juga terdapat kegiatan penyaluran sarana produksi untuk kawasan padi khusus seluas 325 Ha yang tersebar di Kabupaten Pandeglang 225 Ha, Kabupaten Lebak 70 Ha dan Kabupaten Serang 30 Ha. Komponen bantuan terdiri dari benih padi 25 Kg/Ha dan NPK 100 Kg/Ha. Yang terakhir berupa kegiatan Intensifikasi Budidaya Untuk Peningkatan Produktivitas Padi di Kabupaten Serang seluas 5.000 Ha.

Dari beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam upaya peningkatan produktivitas padi, dapat di dukung dan dibuktikan dengan meningkatnya

provitas/produktivitas padi Provinsi Banten sebesar 50.88. Meningkat sebesar 2.47 dibandingkan tahun 2019 dengan provitas sebesar 48.41. (Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020). Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pertanian.

Salah satu penyebab utama hilangnya peluang produksi pangan dan pertanian adalah buruknya kondisi infrastruktur penunjang. Sebagai ilustrasi, jika infrastruktur jaringan irigasi rusak, sesuai hasil kajian Badan Litbang Pertanian, maka kehilangan produksi padi mencapai 20 juta ton GKG. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak seluas 3 juta ha, atau 52% dari total daerah irigasi, mampu memperluas layanan irigasi sehingga mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) sebesar 0,3 atau lebih. Jika produktivitas padi nasional dewasa ini 5,1 ton/ha, rehabilitasi jaringan irigasi secara menyeluruh berdampak terhadap peningkatan produksi lebih dari 4,5 juta GKG per tahun (Sulaiman et al., 2018).

Jika program dan kegiatan pembangunan pertanian selama ini ditargetkan pada wilayah-wilayah yang sudah berkembang (existing), maka ungkitan peningkatan produksi komoditas apa pun tidak akan signifikan. Di sisi lain, pertanian konvensional masih banyak diterapkan petani menjadi ironis karena inovasi teknologi untuk memodernisasi pertanian sudah tersedia. Masalah kerusakan infrastruktur, penanganan pasca panen, dan peningkatan akses petani terhadap pasar juga masih menjadi permasalahan klasik dalam akselerasi peningkatan produksi pangan dan pertanian serta pendapatan petani.

Infrastruktur pertanian dalam arti luas meliputi: (1) *input based infrastructure* mencakup benih, pupuk, obat-obatan, dan alat-mesin pertanian; (2) *resource based infrastructure* berupa irigasi, (3) *physical infrastructure* yang mencakup jalan, transportasi, pergudangan, processing dan preservation; dan (4) *institutional infrastructure* yaitu penelitian, penyuluhan, pelatihan teknologi, pelayanan informasi, pelayanan finansial, dan pemasaran.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani terdiri dari jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), jaringan irigasi tersier dan kuarter. Di samping itu juga diperlukan infrastruktur di

luar areal usahatani seperti jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jalan kabupaten, jalan propinsi, jalan negara, pelabuhan, bandara, sarana transportasi, jaringan listrik, jaringan komunikasi dan lain sebagainya. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) merupakan kegiatan perbaikan/ penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga dapat berdampak pada penambahan luas areal tanam dan/atau meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Jika mengacu pada rata-rata produktivitas padi nasional sebesar 5,2 ton/hektar dan apabila peningkatan indeks pertanaman 0,5 dapat terpenuhi, maka dampak kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi mampu memberikan tambahan peningkatan produksi sangat signifikan. Peningkatan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama pendukung dalam peningkatan produksi tanaman padi di Provinsi Banten Tahun 2020.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Kabupaten/Kota	Tahun 2020
Kab. Lebak	1000
Kab. Pandeglang	255
Kab. Serang	400
Jumlah (ha)	1.655

Dilihat dari tabel di atas Tahun 2020		
pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produksi padi cukup besar dan luas yang akan berdampak langsung bagi petani. Selain rehabilitasi irigasi tersier, pemerintah juga melakukan pembangunan infrastruktur lain sebagai salah satu strategi dalam pencapaian produksi dan produktivitas padi dimana pada tahun 2020 kabupaten lebak yang paling banyak mendapat alokasi pembangunan rehabilitasi dari total jumlah yang dibangun di Provinsi Banten sebanyak 1.655 ha Kabupaten/Kota		Embung (unit)
	Jalan Usaha Tani (km)	
Kab. Lebak	13.077	3
Kab. Pandeglang	1.000	2
Kab. Serang	1.000	3
Jumlah	15.077	8

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten, 2020.

Selain pembangunan rehabilitasi irigasi tersier untuk mendukung pembangunan pertanian, di bangun pula embung dan jalan usaha tani. Embung adalah bangunan artifisial yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air dengan kapasitas volume kecil tertentu. Dapat dilihat dari tabel di atas di mana embung yang paling banyak di bangun ada di daerah Lebak yang merupakan salah satu sentra padi di Provinsi Banten. Embung sangat berguna sekali untuk menjaga kecukupan air pada areal sawah, pendukung yang tak kalah pentingnya adalah jalan usaha tani di mana jalan usaha tani dibangun untuk akses petani menuju sawah dan dapat mengurangi biaya produksi dalam jumlah yang cukup signifikan. Dapat dilihat dari tabel di atas, tahun 2020 Provinsi Banten telah membangun sepanjang 15,077 Km jalan usaha tani dan paling banyak terdapat di Kabupaten Lebak.

Salah satu strategi lain dalam rangka pemulihan perekonomian dan peningkatan produktivitas dari sektor pertanian adalah melalui kegiatan Irigasi Perpipaan, mengingat kegiatan ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 khususnya para petani yang memiliki lahan namun tidak memiliki ketersediaan air yang cukup untuk melaksanakan budidaya tanamannya atau dalam satu tahun hanya bisa berusaha tani sekali saja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 total luas lahan sawah di provinsi Banten 196.285 Ha, terdiri dari lahan sawah irigasi seluas 98.227 Ha dan lahan sawah non irigasi seluas 98.058 Ha. Dari luas lahan sawah non irigasi 98.058 Ha, itu hanya dapat ditanami padi rata-rata satu kali dalam setahun atau 49,96 persen dari total sawah banten belum maksimal dapat dimanfaatkan oleh para petani.

Rata-rata kepemilikan lahan per petani di banten berkisar 0,5 Ha, rata-rata kepemilikan lahan tersebut apabila diasumsikan luas lahan non irigasi 98.058 Ha dengan jumlah petani sebanyak 196.116 petani, sehingga para petani yang terkena langsung dampak pandemi Covid-19 berkisar 196.116 petani.

Dengan demikian, sektor pertanian melalui kegiatan pengembangan irigasi perpipaan menjadi salah satu jawaban bagi para petani sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian, karena pada akhirnya para petani yang mendapat

bantuan pemerintah Provinsi Banten melalui pengembangan irigasi perpipaan dapat berusaha tani dua sampai tiga kali dalam setahun selama ketersediaan sumber airnya mencukupi. Dengan demikian, para petani dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya.

Tujuan dan sasaran dari kegiatan Irigasi Perpipaan adalah untuk mendukung produksi dan produktivitas tanaman, Meningkatkan produksi pertanian melalui ketersediaan air sebagai suplesi air irigasi pada lahan pertanian, Menambah luasan tanam pada lahan sawah/tadah hujan melalui peningkatan intensitas pertanaman, dan mengantisipasi tanam di musim kemarau.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bersama dengan Dinas Pertanian Kabupten diperoleh jumlah kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan sudah ditetapkan untuk mendapat bantuan irigasi perpipaan sebanyak 19 kelompok (19 unit) dengan luas lahan 947 Ha, tersebar di kabupaten Lebak 10 kelompok tani, Pandeglang 4 kelompok tani, Serang 3 kelompok tani dan Tangerang 2 kelompok tani.

Dari 19 kelompok tani penerima bantuan dari pemerintah Provinsi Banten yang luasnya mencapai 947 Ha biasanya dalam satu tahun hanya ditanami satu kali penanaman padi, dan apabila airnya masih cukup para kelompok tani menanam palawija yang tahan kekurangan air. Dengan adanya bantuan dari pemerintah Provinsi Banten melalui kegiatan irigasi perpipaan, para kelompok tani dapat menanam padi 2 kali dalam 1 musim tanam. Melalui irigasi perpipaan total air mengalir dalam waktu satu tahun mampu mengairi seluas 1.681Ha atau dua kali penanaman padi.

Dengan sentuhan irigasi perpipaan dari luas lahan 947 Ha, diproyeksi pada tahun 2021 dapat menambah angka tanam seluas 840,50 Ha atau setara produksi sebesar 3.864,21 ton untuk satu kali tanam saja. Dari jumlah produksi sebesar 3.864,21 ton setelah dikonversi dengan harga rata-rata padi Gabah Kering Giling (GKG) seharga Rp 4.686,- per kilogram diperoleh nilai penjualan sebesar Rp 18.107.671.659,-, artinya pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan kepada kelompok tani menjadi investasi panjang dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, strategi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan produktifitas pertanian pangan, terutama beras terlihat dari beberapa program Pemerintah Daerah yang berupa 1). Perluasan Areal Tanam; 2). Peningkatan Indeks Pertanaman (IP); 3). Peningkatan Produktivitas, serta; 4) Pembangunan infrastruktur penunjang pertanian. Keempat strategi tersebut dilakukan untuk mengatasi ancaman krisis pangan sebagai dampak dari pandemi Covid 19, serta berkurangnya lahan pertanian di Provinsi Banten. Dengan keempat program tersebut, Pemerintah hendak menghadirkan secara langsung metode dan fasilitas untuk menunjang produksi pertanian di wilayah-wilayah yang memang menjadi basis dari kegiatan pertanian, seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, serta sebagian Kabupaten Serang. Strategi Pemerintah Daerah tersebut terbukti cukup efektif. Ditengah tekanan ekonomi akibat pandemi, serta maraknya alih fungsi lahan pertanian serta alih profesi petani menjadi buruh pekerja, produksi beras di Provinsi Banten justru mengalami trend kenaikan. Dalam 3 tahun terakhir produksi beras Provinsi Banten mengalami surplus dan masuk dalam 10 besar Provinsi produsen beras nasional. Sektor pertanian pangan secara keseluruhan juga tidak banyak terdampak oleh tekanan ekonomi pada masa pandemi Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G, S. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: (Pustaka Pelajar).
- BAPPENAS. (2011). *Analisis Kesenjangan Antar Wilayah*. Jakarta.
- Dinas Pertanian Provinsi Banten. (2019). *Dokumen Kajian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Banten.
- Islamy, M. I. (2007). *Prinsip prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahi, A. K. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Kharisma Putra Utama.
- Parsons, W. (2008). *Public Policy: Pengantar*

- Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.*
Jakarta: Kencana.
- Pasandaran, E. (2015). Politik Pembangunan
Pertanian Inovatif Berwawasan
Ekoregion. In *IAARD Press*. Jakarta.
- Thahir, B. (2019). Analisis Strategi Pemetaan
Rencana Tata Ruang Provinsi Banten.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN) Press.
- Winarno. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan*
Publik. Yogyakarta: Media Press.